



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI**

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA.....	5
1.4 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS.....	5
KEBUDAYAANPARIWISATA KEPEMUDAAN DAN.....	5
OLAHRAGA	5
1.5 SUSUNAN ORGANISAS IDINAS KEBUDAYAAN.....	7
PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA	7
CIMAHI	7
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	9
2.2 VISI DAN MISI	11
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS.....	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA	22
TAHUN INI.....	22
3.3 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI	24
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	24
3.4 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI	25
RENJA	25
KERJA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA	25
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI	25
3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN... ..	27
REALISASI PROPINSI DAN DAERAH LAIN DI JAWA BARAT	27
3.6 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN	27
CAPAIAN HASIL KINERJA.....	27
3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	32
3.8 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG	33
MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPIAN KINERJA	33
3.9 REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV.....	38
PENUTUP	38

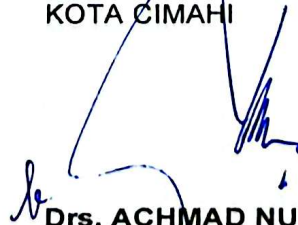
KATA PENGANTAR

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/ Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2022 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan OPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Cimahi, 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLARHAGA
KOTA CIMAH



Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih

lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

LKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan dalam pembuatan LKIP instansi Pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. secara internal LKIP ini merupakan salah satu instrument bagi kita untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja perangkat daerah serta unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah oleh sebab itu kita semua dituntut untuk berlomba dan memahami model serta bentuk format laporan tersebut termasuk data apa saja yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan tersebut agar mendapat penilaian yang lebih baik lagi.

Pada era keterbukaan informasi publik yang berlaku saat ini diperlukan keterbukaan kepada publik (masyarakat) tentang apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku pelayan dan pengayom bagi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, maka diperlukan

suatu system pelaporan yang dapat menyampaikan tentang pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat secara sistematis dan akuntabel.

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pemerintahan, menjadi saran evaluasi dari keberhasilan/kegagalan sebelumnya, menghindari kemungkinan mengulangi kegagalan dan tetap memboroskan sumber – sumber daya. Karena dengan adanya Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya instansi), meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Tahun 2023 Pasca pandemi COVID-19 adalah awal kebangkitan perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2023 perekonomian mulai bangkit lagi, penyelenggaraan pagelaran kesenian, konser olahraga massal sudah bisa dilaksanakan, masyarakat sudah mulai beraktifitas Kembali dan tempat wisata sudah dibuka walaupun harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada tahun 2023 merupakan Awal tahun Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2023-2026.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2020, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

- g. Perwal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Cimahi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Berdasarkan Perda No 14 tahun 2021`tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya banyak masalah masalah yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait terhadap Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga.

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi.

Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Olahraga, maka dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Cimahi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Isu strategi Kota Cimahi di bidang Kebudayaan, Pariwisata kepemudaan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Sadar Wisata di masyarakat dan Pengemabngan Ekraf
2. Masih rendahnya Pemajuan kebudayaan di Kota Cimahi,
3. Belum optimalnya tingkat partisipasi dalam Pembangunan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Olah raga milik Pemerintah, rendahnya prestasi olahraga dan angka partisipasi masyarakat untuk olahraga.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

- Menyelenggarakan festival seni budaya,
- Membuka destinasi wisata baru,
- Pemeliharaan sarana dan Prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi,
- Menjaring kerjasama dengan instansi militer di Kota Cimahi dalam rangka pengembangan wisata heritage militer.
- Menggerakan pemuda melalui organisasi Kepemudaan.
- Menyediakan dan sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan bagi pemuda.

1.5 SUSUNAN ORGANISAS IDINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
CIMAHI

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

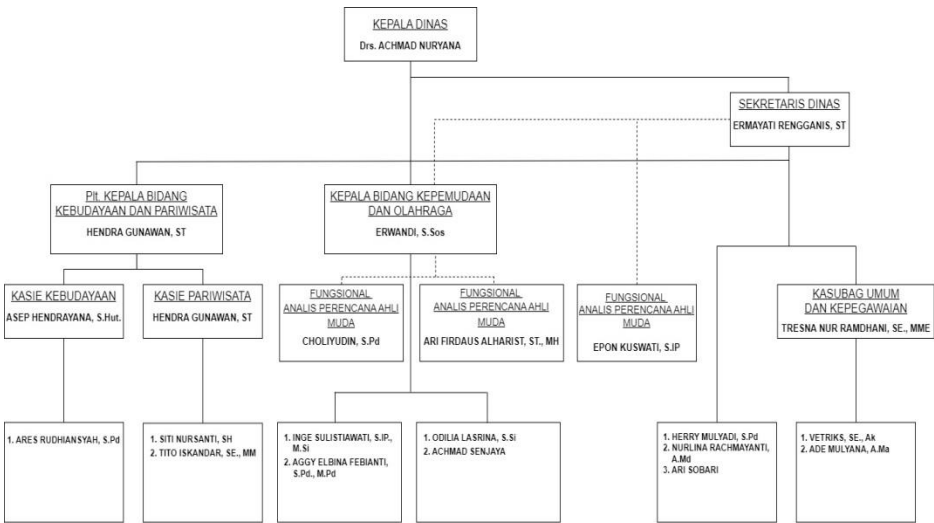
Dalam menjalankan organisasi Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota
Cimahi dan Perwal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Kota Cimahi

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Cimahi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - 1. Seksi Kebudayaan; dan
 - 2. Seksi Pariwisata.
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaandan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai
berikut :



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2021, sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2Dasar Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja
- 1.4.Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.5.Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.6.Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1.Rencana Strategis
- 2.2.Visi dan Misi
- 2.3.Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS

- 3.1.Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3.Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misidiharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi

pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 109 disebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dan pada pasal 58 ayat (1) dan

(2) disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Renstra SKPD harus mampu mengkomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan RPD tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyusun Rencana Strategis 2023-2026, yang memuat panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2023 disusun RPD Kota Cimahi 2023-2026, maka dari itu Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga disusun baru sesuai dengan RPD 2023-2026.

2.2 VISI DAN MISI

Visi Dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah “Cimahi Kota Cerdas”. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat,,
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang berkeadilan,
3. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya saing lingkungan,
4. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga berada di misi 1 dan Misi 3 .

Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah :

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
4. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi,
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan
6. Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan,
7. Meningkatkan Ketahanan bencana.

Tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga termasuk pada kegiatan No. 3, 4 dan 5

2.3 PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang terdapat pada Misi ke 1 (satu) dan Misi 3 (Tiga) yaitu : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ada 7 Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi tahun 2023-2026, Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan olahraga masuk pada Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, dan Meningkatkan tatakelola pemerintahan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun Pertama dari Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023- 2026, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga.

Anggaran Murni tahun 2023 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah Rp 30.069.248.900, yang didalamnya terdapat Hibah untuk Koni Rp 4.000.000.000, NPCI Rp. 1.000.000.000, Pramuka Rp. 300.000.000 , KNPI Rp. 300.000.000, dan DKKC Rp. 200.000.000. sesuai amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hibah termasuk kedalam anggaran di Dinas. Kemudian pada Anggaran Perubahan Anggaran menjadi Rp 32.530.919.997 karena ada penambahan untuk DED Lapangan Cibaligo, DED Gor Padasuka, DED Gor Sangkuriang, DED Pematangan Lahan Cibodas, Festival Kuliner, dan untuk Eco Wisata Cimenteng.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dibuat sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
MISI 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Yang Berbasih Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientai Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi Dan Industri Kecil Menengah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
1	Meningkatnya Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) 2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) 3) Length of Stay (Lama kunjungan wisata)
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan			
2	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kreatif dan Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan

3	Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga
5	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai RB

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 ada perubahan satu indikator dengan tahun 2022, karena masa Renstra tahun 2017-2022 telah berakhir dan disusun Renstra Baru tahun 2023-2026 yang dirasakan ada yang perlu perubahan di Indikator Kebudayaan yaitu yang tadinya Prosentase Kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan berubah menjadi Prosentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan. Kemudian ditambah satu lagi yaitu Indikator nilai RB yang dimasukkan untuk nilai di Kesekretariatan.

Pandemi Covid 19 telah berlalu, Perekonomian harus segera bangkit. Masyarakat mulai berjuang untuk meningkatkan perekonomiannya dan Pemerintah pun mulai memperbaiki semua system perekonomian yang akan menunjang perekonomian Masyarakat yang salah satunya adalah dengan menjadikan kebangkitan Sektor Pariwisata sebagai salah satu tonggak perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kota Cimahi sejak tahun 2022 sangat konsen terhadap Pariwisata terbukti dengan memberikan anggaran untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Cimahi antara lain memberikan sarana dan prasarana untuk promosi Pariwisata berupa Kamera, drone, sound system dan mengembangkan wisata di Cimenteng.

Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 10 program dan 23 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan untuk dua Bidang dan satu sekretariat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 32.530.919.997. Rincian anggaran perkegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.961.028
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	223.872.328
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.088.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.692.525.663
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.483.994.121
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.462.928
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.015.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.806.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.247.064
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	325.390.400
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	275.390.400
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.560.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.973.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.563.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.974.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.738.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.917.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.894.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		163.201.608
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.560.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.541.608
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.103.855.730
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.350.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.074.016
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.570.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	788.861.714
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran,Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		193.895.000
		Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	92.570,000
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	101.325.000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		564.726.428
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	564.726.428
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		7.154.117.970
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.154.117.970
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6.251.725.950
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	6.251.725.950

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5.837.220.800
	Seleksi Atlet Daerah	262.825.100
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	5.574.395.700
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	719.225.178
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	410.345.178
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	308.880.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	769.121.700
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	396.999.700
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	372.122.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	806.970.064
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	559.962.014
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	88.609.000
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	158.399.050
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.234.000
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000

		Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	40.234.000
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota		2.379.362.750
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.379.362.750
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota		94.876.200
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	89.286.200
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	5.590.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		149.250.000
		Penetapan Cagar Budaya	149.250.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		63.020.000
		Pelindungan Cagar Budaya	63.020.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		148.295.500
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	134.295.500
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.000.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.913.633.800
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.854.257.800
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	59.376.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Desnitasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		21.286.550
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	21.286.550

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekpresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	400.702.428
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	400.702.428

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Cimahi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	>100%	Melebihi/melampaui target (baik sekali)
2	76%- 100%	Sesuai target (Baik)
3	55% - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (Enam) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1, terdiri dari 3 indikator;
- 2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
- 3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
- 4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;
- 5. Sasaran 5, terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026.

3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama tahun 2023 menunjukan hasil dengan Rumusan sebagai berikut :

Ralisasi Kinerja tahun 2023

Capaian Kinerja = -----

Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN					
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	30	426	1420%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	41.000	157.427	383,9%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
	MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN					
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	50%	63,13%	126,26 %	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2%	8,98%	80,18%	Sesuai target/baik
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakatyang Aktif Berolahraga	46%	46,89%	101,93 %	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
5	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Nilai RB	50	51,47	102,94	Melebihi/ melampaui target (baiksekali)
		Rata Rata capaian IKU			330,74%	Melampaui target (baiksekali)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga pada tahun 2023 sebesar **330,74%** atau bermakna **melebihi/melampaui target (sangat baik sekali)**.

Dalam penentuan target kunjungan Wisatawan Nusantara dan Manca Negara ketika itu kami masih berasumsi pandemi masih berlangsung, oleh karena itu penentuan target masih rendah. Ternyata di tahun 2023 pandemi telah berlalu, tempat wisata dan tempat hiburan dibuka kembali sehingga angka kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan. Ditahun 2023 target jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 41.000 kunjungan sementara capaiannya 157.427 kunjungan kalau diprosentasekan capaian targetnya adalah 383,9%. Target jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara adalah 30 kunjungan sedangkan capaiannya adalah 426 kunjungan. Prosentase terhadap capaian mencapai 1420%. Sebetulnya di tahun 2023 ingin ada perubahan target tapi karena perubahan target harus bersamaan dengan perubahan RPD, yang mengakibatkan kami belum bisa merubah target untuk Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara sehingga capaian sangat melebihi dari target (Terlalu Jauh). Untuk Capaian length of stay target tahun 2023 adalah dua hari satu malam, capaian tahun 2023 juga Dua hari satu malam sehingga mencapai 100%.

Tahun 2023 pelaku kebudayaan yang diberdayakan adalah 50% sementara capaiannya adalah 63,13%. Sehingga apabila diprosentasekan mencapai 126,26% dalam arti kata melebihi dari target yang diinginkan.

Pencapaian target kinerja di Olahraga 101,93% Melebihi target yang telah ditentukan yaitu 11,2% tetapi Kepemudaan hanya mencapai 80,18% dari target sebab data dukung pemuda yang valid jauh lebih sedikit dari tahun kemarin dikarenakan belum adanya Pendataan sehubungan dengan kurangnya SDM dan anggaran yang mendukung terhadap kegiatan Pendataan.

3.3 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGANTAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3. Ketercapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkat nya kualitas pengelolaan pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	5	183	426	
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	45.869	105.078	157.427	
		3	Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	4	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	55,56%	90%		
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	5	Persentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan			63,13%	
3	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	6	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,20%	11,40%	8,98%	
4	Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam berolahraga	7	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46,17%	46,50%	46,86%	
5	Meningkatnya Kualitas dan inovasi pelayanan publik	8	Nilai RB			51,47	

Tahun 2023 angka kunjungan wisatawan Mancanegara naik sekitar 232% yang dari sebelumnya 183 kunjungan menjadi 426 Kunjungan itu menandakan wisatawan Mancanegara sudah mulai meningkat dan tidak takut lagi masuk ke Indonesia. Ini merupakan bertanda baik untuk sektor pariwisata Kota Cimahi.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara naik 149 % dari 105.078 menjadi 157.427, ini menandakan masyarakat Indonesia sudah mulai bergeliat untuk berwisata kembali dan itu memberikan semangat kepada para pelaku pariwisata di Kota Cimahi.

Length Of Stay secara target mau Capaian Kinerja di tahun 2022 dan 2023 sama yaitu 2 hari 1 malam. Target belum bisa ditambah karena belum ada penambahan akomodasi Hotel dan tempat wisata di Cimahi belum banyak.

Prosentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan dengan capaian kinerja 63,13% merupakan indikator baru di Renstra 2023-2026 sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator Kinerja Tahun 2022 adalah Prosentase Kebudayaan yang dikembangkan dan dilestarikan.

Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 8,98% . Penurunan Prosentase Pemuda yang aktif didalam pembangunan dikarenakan kami mencoba memvalidasi data yang ada tapi karena kekurangan SDM dan Anggaran untuk pendataan jadi data yang masuk hanya 8,98%.

Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 46,89 % naik dari tahun 2022 yang Capaian Kinerjanya sebesar 46,5%. Walaupun naiknya tidak signifikan hanya 0,39% tapi ini menjadikan arah positif bahwa masyarakat sudah mulai mengerti akan pentingnya olah raga.

3.4 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI RENJA KERJA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

3.4.1 Matrik Banding Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Rumusan Prosentase Perbandingan antara Capaian Kerja 2023 dengan Target akhir Renstra 2026 :

Capaian Kinerja

----- X 100%

Target Akhir Renstra Tahun 2026

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	PROSENTASE PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENTRA TAHUN 2026
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	426	60	710%
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	157.427	47.462	331,9%
3	Length of stay	2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	100%

4	Prosentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan	63,13%	100%	63%
5	Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan	8,98%	11,5%	78.09%
6	Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga	46,89%	46,7	100,4%
7	Nilai RB	51,47	50,6	101,7%

Rencana Strategis tahun 2023-2026 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Target akhir RPD Tahun 2026 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah 60 Kunjungan, melihat capaian kinerja tahun 2023 sebesar 426 sudah melebihi dari target akhir RPD yang ditetapkan. Prosentase Perbandingan antara Capaian Kinerja 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah 710%.

Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara 2023 Capiannya Kinerjanya adalah 157.427 kunjungan sedangkan target akhir tahun 2026 pada Renstra adalah 47.462. Melihat data tersebut maka jumlah Kunjungan Wisatwan Nusantara telah melampaui target akhir Renstra di 2026. Prosentase Perbandingan antara Capaian Kinerja 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah 331,9%.

Sebetulnya target Renstra mau diubah tapi karena perubahan Renstra harus bersamaan dengan Perubahan RPD jadi untuk Tahun 2023 belum bisa dilakukan perubahan target karena belum ada perubahan RPD.

Target Length of Stay dari 2023-2026 tidak ada perubahan yaitu 2 Hari 1 Malam, sedangkan untuk Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah 2 Hari 1 Malam. Melihat data Tersebut Target Akhir Capaian Kinerja 2026 telah terpenuhi.

Indikator Capaian Kinerja Kebudayaan adalah Prosentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan Tahun 2023 capaian Kinerjanya 63,13% sementara target akhir Renstra di tahun 2026 adalah 100%. Masih ada waktu 3 tahun lagi untuk mencapai 100%.

Capaian Kinerja Prosentase Pemuda yang aktif dalam Pembangunan tahun 2023 adalah 8,98% sementara target akhir Renstra tahun 2026 adalah 11,5% atau 78,09%. Masih ada Waktu 3 tahun lagi untuk meningkatkan capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Prosentase Pemuda dalam Pembangunan.

Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga target akhir Renstra tahun 2026 adalah 46,7%, sementara capaian Kinerja tahun 2023 sudah mencapai 46,89 sudah melebihi dari target yaitu 100,5%. Salah satu

Indikator yang baru ditahun 2023 adalah Nilai RB Capaian Kinerjanya tahun 2023 adalah 51,47 sedangkan target akhir Renstra tahun 2026 adalah 50,6. Kalau dilihat dari data tersebut sudah melebihi dari target.

3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI PROPINSI DAN DAERAH LAIN DI JAWA BARAT

Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara Propinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah 293. 856 Kunjungan sedangkan Kota Cimahi sebanyak 426 Kunjungan jadi sekitar 0,145% dari jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara di Jawa Barat. Mudah mudahan kedepannya lebih meningkat lagi karena Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten bandung dan Kota Bandung yang memiliki angka Kunjungan Wisatawan Mancanegaranya tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Kota Banjar yang sama berdirinya di tahun 2001 kota Cimahi masih Unggul. Kota Banjar memliki angka Kunjungan Wisatawan Manca negaranya 2 Kunjungan.

Untuk Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Propinsi Jawa Barat adalah 88.265.401 Kunjungan sedangkan Kota Cimahi Tahun 2023 jumlah Kunjungannya 157.427 atau 0,178%. Kedepannya dengan di kembangkannya destinasi wisata baru diharapkan jumlah kunjungan semakin meningkat karena kita berbatasan dengan Kota bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang angka kunjungan Wisatawan Nusantara Tinggi Di Jawa Barat yang diharapkan Wisatawan bisa berkunjung Ke Kota Cimahi juga.

3.6 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN CAPAIAN HASIL KINERJA

**Tabel 3.5 Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	60	426	710%
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	47.426	157,247	331,3%
Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%

Angka Kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 adalah 426 kunjungan naik sampe 2 kali lipat dari tahun 2022, Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Capaiannya 710% karena ketika menetapkan target di Renstra sedang dalam keadaan Pandemi Covid 19 yang dirasakan sangat mempengaruhi terhadap perekonomian Bangsa Indonesia yang mengakibatkan angka Kunjungan Wisatawan Anjlok sebab adanya pembatasan kedatangan orang dari Luar Negeri sehingga kita dalam menetapkan target kecil.

Pada tahun 2023 angka kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 49%. Bila kita prosentasekan terhadap target tahun 2023 Capaian Kinerjanya mencapai 331,3%. Sama Seperti Penetapan target Wisatawan Mancanegara dalam keadaan pandemi Covid 19 sehingga menetapkan targetnya kecil.

Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara menandakan perekonomian masyarakat Indonesia mengalami perbaikan walaupun belum dinyatakan pulih 100%. Tapi itu bertanda baik untuk sektor Pariwisata Kota Cimahi. Rumah Makan, Restoran, Café dan tempat wisata semua nya sudah bisa buka normal seperti sebelum Pandemi covid, tinggal menguatkan permodalan di semua sektor.

Data lama tinggal wisatawan (length of Stay) terdata berdasarkan rata-rata lama hunian pada akomodasi penginapan yang tersebar di Kota Cimahi. Wisatawan yang berkunjung ke akomodasi di kota Cimahi rata rata tidak lama kemungkinan dikarenakan kurangnya destinasi Pariwisata yang bisa dikunjungi.

Berikut merupakan perbandingan daftar kunjungan wisatawan ke Kota Cimahi pada tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 :

Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

Tahun	Jumlah Kunjungan	
	Wisman	Wisnus
2020	91	65.610
2021	5	45.869
2022	183	105.078
2023	426	157.427

Sumber: Disbudparpora

- **Permasalahan:**
Kota Cimahi memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas sehingga akan sangat kecil bila ingin mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai objek wisata unggulan serta masih

kurangnya dukungan dari Stakeholder terkait untuk pengembangan pariwisata. Selain itu belum ada Objek Wisata wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah tidak ada retribusi langsung dari sektor Pariwisata.

- **Solusi:**

Mengembangkan destinasi wisata baru yaitu Ecowisata Cimenteng merupakan angin segar untuk perkembangan Pariwisata di kota Cimahi. Sumber Dana Pembangunan Ecowisata cimenteng berasal dari Bantuan Gubernur tahun 2021 dan di tahun 2022 dan 2023 dari APBD serta Pengembangan event event seperti Wisata Kuliner, Pekan Kebudayaan, Pagelaran musik dan Pasanggiri Mapag Panganten yang bisa mendatangkan orang atau wisatawan nusantara dari berbagai Daerah ke Kota Cimahi.

Tabel 3.7 Sasaran 2
Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Prosentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan	50 %	63,13%	126,26%

Tahun 2023 Kegiatan di Kebudayaan banyak melibatkan pelaku budaya seperti Hari Musik, Pekan Kebudayaan, Pasanggiri mapag Panganten dan Pagelaran Seni di hari HUT Cimahi. Dengan adanya Hibah untuk DKKC banyak kegiatan yang dilakukan sehingga para pelaku kebudayaan di Cimahi banyak diberdayakan sehingga mempengaruhi terhadap perhitungan Prosentase pelaku kebudayaan yang

- **Permasalahan:**

1. Kurangnya sarana atau gedung dan ruang publik untuk tampilnya para budayawan
2. Partisipasi masyarakat yang kurang terhadap tampilan – tampilan kebudayaan
3. Cara berpikir para pelaku seni yang masih kurang terbuka
4. Kurangnya heleran, festival atau gelaran yang dilaksanakan dikota CImahi

Solusi:

1. Imah Seniman
2. Menyelenggarakan FGD untuk para seniman dan budayawan

- Memperbanyak pelaksanaan gelar seni untuk ruang berekspresi para pelaku seni budaya

Tabel 3.8. Sasaran 3
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2%	8,98%	78.09%

Partisipasi pemuda diukur berdasarkan tingkat keikutsertaan pemuda usia 16 – 30 tahun dalam aktivitas dalam berorganisasi yang berdampak positif serta dapat mengembangkan potensi pemuda sehingga ke depannya menjadi lebih tangguh dan dapat berkontribusi dalam pengembangan pembangunan bangsa.

Aktivitas yang difasilitasi antara lain penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pemuda, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, seleksi pemuda, pembinaan bagi anggota Pelatih PMR dan PMI, rapat pimpinan organisasi kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Gathering Pemuda, Festival , Senam bersama , Seleksi paskibra, Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan.

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Fasilitasi kegiatan kepemudaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong agar pemuda lebih aktif dalam upaya pembangunan bangsa karena pemuda yang akan memegang tongkat estafet pemimpin dan peserta pembangunan bangsa kelak.

Permasalahan:

- Belum adanya gedung pemuda
- Kurangnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi
- Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran untuk pendataan

Solusi:

- Merencanakan pembangunan gedung pemuda
- Menyelenggarakan event – event pemuda
- Melaksanakan Pendataan tentang Kepemudaan.

Tabel 3.9. Sasaran 4

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2021
Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46, %	46,89%	101,9 3%

Perkembangan aktivitas olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Terdapat 212 klub olahraga beserta 35 organisasi olahraga di Kota Cimahi. Pemasyarakatan olahraga di kota Cimahi melalui peningkatan jumlah event olahraga sekaligus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berolahraga minimal 1 kali seminggu. Angka partisipasi masyarakat berolahraga dihitung berdasar APMO tahunan (Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga).

Permasalahan:

1. Kurang tersedianya fasilitas – fasilitas keolahragaan untuk masyarakat yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi
2. Belum optimalnya tata kelola urusan keolahragaan.
3. Masih banyak atlet pelajar Kota Cimahi yang bersekolah di luar Cimahi yang bersekolah di luar Kota Cimahi sehingga tidak dapat mengikuti seleksi atlet mewakili Kota Cimahi.
4. Sarana olahraga milik Kota Cimahi saat ini dalam kondisi rusak sehingga tak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solusi:

1. Membuat MoU dengan pusdik – pusdik untuk penggunaan sarana olahraga,
2. Melakukan pembinaan pada atlet – atlet tingkat pelajar.
3. Melakukan pemeliharaan dan revitalisasi terhadap sarana olahraga milik pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 3.10. Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2021
Nilai Reformasi Birokrasi	50%	51,47%	102,9 4%

Nilai Reformasi RB baru masuk kedalam Target Renstra Tahun 2023-2026. Point point Penilaian RB sangat banyak sehingga hanya menargetnya 50 karena dirasakan masih susah untuk mencapai nilai diatas 70. Realisasi Nilai RB tahun 2023 sebesar 51,47% sehingga capaian targetnya mencapai 102,94%.

Permasalahan :

- 1. Masih belum mengerti akan pentingnya penilaian RB
- 2. Kurang dukungan dari rekan rekan sesama ASN
- 3. Banyak pekerjaan yang dikerjakan tapi kurang bukti dukungnya.

Solusi :

- 1. Sosialisasi tentang penilaian dan manfaat dari penilaian RB
- 2. Setiap Pekerjaan yang dilaksanakan harus ada bukti dukung dan diarsipkan.

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Rumusan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan anggaran}$$

3.11 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	1420	91,06%	1.328%
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	383,9	91,06%	292,84 %
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	100%	91,06%	8,94%
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	126,26%	97,63%	28,63%
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	78,09%	95,44%	-17,35%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	101,93%	96,62%	5,31%
5	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Nilai RB	102,94%	91,76%	11,18

Dilihat dari tabel diatas rata rata indikator menunjukan adanya efisiensi. Kecuali satu yaitu Indikator Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Efisiensinya - 17,35% dikarenakan data yang disajikan tahun 2023 adalah data yang sudah tervalidasi sehingga banyak yang berkurang data kepemudaannya dari tahun 2022, sehingga terjadi penurunan tajam capaian kinerja 2023. Yang paling besar Efisiensinya adalah di sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan kepariwisataan,

itu dikarenakan dalam penentuan targetnya terlalu kecil karena waktu itu dalam keadaan Pandemi Covid 19.

3.8 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Didalam DPA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga terdapat 11 Program, 23 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan yang menunjang terhadap pencapaian Kinerja di 7 Indikator Kinerja Utama. 1 Program Di Sekretariat menunjang terhadap Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi, 2 Program di Kepemudaan untuk Capaian Kinerja Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan, 1 Program Olah Raga untuk Capaian Kinerja Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga, 3 Program untuk Capaian Kinerja Prosentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan dan 3 Program yang mendukung capaian kinerja untuk Angka Kunjungan wisatawan dan Length Off stay. Adapun nama Program, Kegiatan dan Sub kegiatannya Sebagai berikut :

3.11 Tabel Program Kegiatan, Subkegiatan yang menujang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
		Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

		Seleksi Atlet Daerah
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		Penetapan Cagar Budaya
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		Pelindungan Cagar Budaya
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

PARIWISATA		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Desnitasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekpresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

3.9 REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung dipergunakan pada 4 sasaran strategis yang terdiri dan 10 program, serta kegiatan pendukung yang terdiri dari 23 kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran, telah terealisasi pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TAHUN 2023		Persentas eCapaian
			ANGGARAN	REALISASI	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.061.929.300	1.856.348.710	90,03%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	21.286.550	21.190.550	99,55%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.702.428	384.350.590	95,92%
4	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	1.576.091.784	1.544.883.360	98,2%

5	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kesenian Tradisional	140.234.000	136.644.608	97,44%
6	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	212.270.000	201.375.300	94,87%
7	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	758.621.428	710.343.884	93,64%
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	100%
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	19.962.289.898	19.266.004.565	96,51%
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan inovasi Pelayanan Publik	Penunjang urusan pemerintah daerah	7.097.494.629	6.512.603.096	91,76%

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 30.913.644.663,- atau 95,03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.530.919.997,- . Efisiensi anggaran sebesar 4,07% dari anggaran yang ada yang berasal dari sisa pengadaan dan ada satu pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu pengamanan tanah Cibodas belum dilaksanakan dikarenakan pembelian tanah Cibodas baru beres dibulan Desember yang tidak memungkinkan pekerjaan pengamanan Cibodas dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2022 ini, dapat Kami simpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 5 Sasaran Strategis dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut :

- Ada 5 Sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang terjabarkan kedalam & Indikator Kinerja Utama.
- **Sasaran Strategis 1** ada 3 indikator Kinerja , dengan capaian kinerja indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 426 kunjungan dari target 30 orang (1420%). Kenaikan ini sangat signifikan dikarenakan Pandemi Covid 19 sudah dicabut sehingga wisatwan mancanegara sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia sehingga angka kunjungan wisatawan ke Kota Cimahi ikut meningkat.
 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 157.427 Kunjungan dari target 41.000 Kunjungan (383,9%, Kenaikan ini juga dikarenakan Pandemi Covid 19 sudah berlalu.
 3. Lama Kunjungan wisata 2 hari 1 malam dari target 2 hari 1 malam. (100%) sesuai dengan target.
- **Sasaran Strategi ke 2** memiliki 1 Indikator yaitu prosentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan capaian Kinerjanya 63,13% dari target Kinerja 50% atau sekitar 126,26% kenaikannya.

- **Sasaran ke 3** memiliki 1 indikator yaitu Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan dengan capaian kinerjanya 8,98% dari target 11,2% atau 80,18%, Capaian Kinerja kurang dari target yang ditentukan dikarenakan Data yang diperlukan adalah by name by addres belum bisa mencapai target karena kurangnya SDM dan anggaran untuk pendataan.
- **Sasaran ke 4** Memiliki 1 indikator yaitu Prosentase Masyarakat yang aktif berolahraga capaian kinerjanya adalah 46,89% dari target 46% atau 102,93%. Melebihi target sedikit.
- **Sasaran ke 5** Memiliki 1 indikator yaitu Nilai RB dengan capaian 51,47 dari target 50 atau 102,94% melebihi target sedikit.

Penyerapan Anggaran pada tahun 2023 sebesar 95,03% yaitu Rp.30.913.644.633, dari anggaran yang tersedia 32.530.919.997 dengan sisa anggaran sebanyak 1.617.275.334. Sisa anggaran yang tersedia berasal dari efisiensi anggaran dan tidak diserapnya Pekerjaan Pengamanan Tanah Cibodas dikarenakan Pembelian Tanah Cibodas baru selesai diakhir Desember sementara pekerjaan pengaman harus beres terlebih dahulu pembeliannya sehingga tidak memungkinkan Pekerjaan Pengamanan dilakukan diakhir Desember. Ada satu bidang tanah dengan uasan 157M2 an Sunanto tidak mencapai kata sepakat utk harganya, sehingga dilakukan langkah menitipkan uang ke Pengadilan Negeri untuk konsinasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 sasaran dan 7 indikator sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi ada satu indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu prosentase Pemuda yang aktif didalam pembangunan dari target 11,2% hasil capaian 8,98% dikarenakan data by name by addres tidak bisa dipenuhi disebabkan karena kurang Sumber Daya Manusia dan Anggaran untuk melakukan pendataan. Tapi kalau dirata ratakan seluruh capaian Kinerja melampaui target/baik sekali dengan capaian 330,74% dikarenakan target kinerja untuk kunjungan wisatwan terlalu kecil. Penetapan target kinerja kunjungan wisatwan waktu itu masih dalam keadaan pandemi sehingga ketakutan Pandemi berlangsung lama yang mengakibatkan target yang ditetapkan rendah.

Rekomendasi Di tahun 2024 diusulkan ada perubahan target Kinerja untuk angka kunjungan wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara serta Prosentase Pemuda yang aktif didalam pembangunan. Target kunjungan Wisatawan di prediksi kan naik karena ekonomi masyarakat berangsur pulih, sedangkan untuk Prosentase pemuda diturunkan dikarenakan masih kurang SDM dan anggaran untuk pendataan. Untuk di Anggaran perubahan 2024 atau Di

anggaran 2025 dipastikan untuk dianggarkan pendataan untuk semua bidang.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- Menambah event yang mengumpulkan banyak orang sehingga angka kunjungan wisatawan meningkat
- Pengembangan wisata ecco wisata Cimenteng
- Pengembangan Wisata di Ciseupan
- Pembangunan Imah seni serta pengadaan sarana dan prasarananya
- Merencanakan pembangunan gedung pemuda ataupun creative center untuk pengembangan industry kreatif dan pemuda.
- Revitalisasi Stadion Sangkuriang, Gor Sangkuriang, Gor Padasuka, Lapangan Cibaligo dan Lapangan Poral.
- Pembelian tanah di Cibodas Kelurahan Utama Kec Cimahi Selatan untuk lapangan sepakbola
- Melakukan pembinaan pada atlet – atlet tingkat pelajar (pembentukan LPPD)
- Melakukan pagelaran seni serta kegiatan kepemudaan dan olahraga
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana atas asset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pemanfaatannya.

Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi secara keseluruhan pada Tahun 2023, telah dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan.

Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, Mudah – mudahan kedepan dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi

